OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA

REVISI PENGUMUMAN
PENGISIAN JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA
DI LINGKUNGAN OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : PG.KP.02.01/ 04 /XI-2018

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Pasal 107 huruf (c) angka (1) bahwa persyaratan untuk dapat diangkat dalam JPT dari kalangan PNS adalah memiliki kualifikasi pendidikan paling rendah sarjana atau diploma IV dan untuk memberikan kesempatan lebih luas bagi peserta mengikuti seleksi terbuka pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama di Lingkungan Ombudsman RI kami melakukan revisi persyaratan pendidikan, dengan ketentuan sebagai berikut :

A. Jabatan yang akan diisi

1. Kepala Biro Fasilitasi Pelayanan Teknis (Eselon II.a)
2. Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Teknologi Informasi (Eselon II.a)
3. Inspektur (Eselon II.a)

B. Persyaratan Administrasi

1. Berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil;
2. Sekurang-kurangnya memiliki pangkat Pembina Tingkat I atau Golongan (IV/b)
3. Memiliki pengalaman jabatan dalam bidang tugas yang terkait dengan jabatan yang akan diduduki secara kumulatif paling singkat selama 5 (lima) tahun
4. Sedang/pernah menduduki Jabatan Administrator (Eselon III)/Jabatan Fungsional Jenjang Ahli Madya paling singkat 2 (dua) tahun;
5. Usia paling tinggi 56 (lima puluh enam) tahun per tanggal 31 Januari 2019;
6. Memiliki kualifikasi pendidikan **semula minimal S-2 menjadi minimal S-1 / D-IV**;
7. Semua unsur penilaian prestasi kerja sekurang-kurangnya bernilai Baik dalam 2 (dua) tahun terakhir (Penilaian Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) tahun 2016 dan tahun 2017;
8. Telah menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) / Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN);
9. Mendapat persetujuan/rekomendasi dari Pejabat Pembina Kepegawaian untuk mengikuti rangkaian Seleksi Terbuka Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Ombudsman Republik Indonesia;
10. Tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang dan/atau berat dalam 3 (tiga) tahun terakhir sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
11. Tidak memiliki afiliasi dan/atau menjadi anggota partai politik dan tidak pernah menjadi calon legislatif dari partai politik;
12. Memiliki rekam jejak jabatan, integritas, dan moralitas yang baik;
13. Memiliki kompetensi, kepemimpinan, dan integritas yang dibutuhkan;
14. Sehat jasmani dan kejiwaan/rohani;
15. Berkomitmen untuk menandatangani Pakta Integritas;
16. Telah menyerahkan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan (SPT Tahunan PPh) Tahun 2016 dan Tahun 2017;
17. Mengajukan surat lamaran yang ditandatangani Pelamar dan bermeterai Rp. 6.000,- yang ditujukan kepada Panitia Seleksi Calon Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Ombudsman Republik Indonesia;
18. Mampu bekerja sama dan bersosialisasi dengan tim dengan berbagai macam kultur; dan
19. Memiliki etos kerja dan mampu bekerja di bawah tekanan.

C. Lamaran dan Kelengkapan Dokumen

Lamaran ditujukan kepada Panitia Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Ombudsman Republik Indonesia, dengan melengkapi persyaratan sebagai berikut:

1. Surat Lamaran yang ditandatangani pelamar dan bermeterai Rp. 6.000,-
2. Daftar Riwayat Hidup yang memuat data pribadi, pengalaman riwayat jabatan, riwayat pendidikan, nomor HP, alamat email;
3. Surat Persetujuan Pejabat Pembina Kepegawaian dan bermeterai Rp. 6.000,-;
4. Surat Keterangan Atasan Langsung yang menyatakan tidak pernah menjalani hukuman pidana, serta hukuman disiplin tingkat sedang, atau tingkat berat yang dibubuhi Meterai Rp. 6.000,-;
5. Surat Pernyataan tidak memiliki afiliasi dan/atau menjadi anggota partai politik dan tidak pernah menjadi calon legislatif dari partai politik dan bermeterai Rp. 6.000,-;
6. Pakta Integritas yang ditandatangani Pelamar dan bermeterai Rp. 6.000,-;
7. Fotokopi Ijazah S-1 (S-2 dan/atau S-3 jika ada);
8. Fotokopi Surat Keputusan Pengangkatan dalam Pangkat Terakhir min. Pembina Tingkat I atau Golongan (IV/b);
9. Fotokopi Surat Keputusan Pengangkatan dalam Jabatan Struktural/Fungsional dalam Jabatan Terakhir;
10. Fotokopi sertifikat Diklat Kepemimpinan Tingkat III (Diklat PIM Tk. III) dan/atau Tingkat II (Diklat PIM Tk. II), serta sertifikat diklat teknis maupun fungsional yang relevan dengan jabatan yang dilamar;
11. Fotokopi Penilaian Prestasi Kerja PNS Tahun 2016 dan Tahun 2017;
12. Surat Keterangan Dokter dari Rumah Sakit Pemerintah, yang terdiri atas:
    a. Surat Keterangan Sehat Jasmani;
    b. Surat Keterangan Sehat Kejiwaan/Rohani dari Dokter Spesialis; dan
    c. Surat Keterangan Bebas Narkoba **(dapat menyusul pada saat Assessment).**
13. Fotokopi KTP/SIM/Paspor;
14. Fotokopi NPWP;
15. Fotokopi bukti penyerahan SPT Tahun 2016 dan Tahun 2017;
16. Fotokopi laporan penyerahan LHKASN/LHKPN;
17. Pasfoto terbaru berwarna ukuan 4 x 6 sebanyak 2 (dua) lembar.

D. Pendaftaran

Pengumuman dilaksanakan mulai tanggal 26 November s.d 17 Desember 2018 pada laman Ombudsman Republik Indonesia dengan alamat www.ombudsman.go.id.

1. Pelamar mengirimkan lamaran beserta dokumen kelengkapannya mulai tanggal 26 November 2018 Pukul 09.00 WIB dan ditutup pada tanggal 17 Desember 2018 pukul 16.00 WIB yang ditujukan kepada Panitia Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Ombudsman Republik Indonesia dengan alamat :

   PANITIA SELEKSI JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA
   OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA
   Jl. H.R. Rasuna Said, Kav. C-19, Kuningan, Jakarta Selatan 12920
   email : panseljpt@ombudsman.go.id Telp : 021-52960907

   Softcopy lamaran dan dokumen kelengkapan dikirimkan melalui email panseljpt@ombudsman.go.id
2. Seluruh dokumen administrasi yang disampaikan menjadi hak milik Panitia Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Ombudsman Republik Indonesia.
3. Seluruh pengumuman dalam tahapan seleksi ini akan disampaikan langsung kepada peserta yang lulus tahapan seleksi dan/atau melalui *website* Ombudsman Republik Indonesia dengan alamat www.ombudsman.go.id.

E. Jadwal Tentatif Kegiatan

NO	KEGIATAN	WAKTU
1.	Pengumuman pendaftaran	26 November 2018
2.	Penerimaan lamaran	26 November – 17 Desember 2018
3.	Pengumuman hasil seleksi administrasi	19 Desember 2018
4.	Ujian Makalah	8 Januari 2019
5.	Pengumuman hasil ujian makalah	11 Januari 2019
6.	Assessment	15 - 16 Januari 2019
7.	Presentasi dan wawancara akhir	24 - 25 Januari 2019
8.	Pengumuman hasil akhir seleksi	31 Januari 2019

F. Tahapan Seleksi

1. Seleksi Administrasi.
   a. Panitia melakukan verifikasi terhadap kelengkapan berkas administrasi sesuai dengan ketentuan yang dipersyaratkan;
   b. Selanjutnya panitia menetapkan calon peserta yang memenuhi persyaratan administrasi untuk mengikuti seleksi berikutnya.
2. Seleksi Pembuatan Makalah.
   a. Pembuatan makalah dan paparan dilaksanakan di Badan Kepegawaian Negara;
   b. Selanjutnya Sekretariat Panitia Seleksi akan menyampaikan hasil pembuatan makalah kepada Panitia Seleksi dan mengumumkan hasilnya di website Ombudsman.
3. *Assessment Center.*
   a. Penilaian menggunakan metode *Assessment Center* (tertulis, diskusi, dan wawancara) dilaksanakan di Badan Kepegawaian Negara;
   b. Selanjutnya panitia menetapkan dan mengumumkan peserta yang lulus seleksi Asesmen, untuk mengikuti tahapan seleksi berikutnya.
4. Seleksi Wawancara dan Presentasi.
   a. Panitia Seleksi akan melakukan wawancara akhir dan presentasi terhadap peserta yang lulus seleksi pembuatan makalah, dan dapat mengundang *user* sesuai jabatan;
   b. Selanjutnya ketua pansel menyampaikan 3 (tiga) calon pejabat kepada Pejabat Pembina Kepegawaian Ombudsman Republik Indonesia.

Seluruh hasil pelaksanaan tahapan seleksi akan diumumkan langsung kepada peserta yang lulus dengan tahapan seleksi dan/atau melalui website Ombudsman Republik Indonesia dengan alamat www.ombudsman.go.id.

G. Deskripsi Tugas Jabatan

1. Kepala Biro Fasilitasi Pelayanan Teknis

Kepala Biro Fasilitasi Pelayanan Teknis mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan fasilitasi pelayanan teknis pengawasan pelayanan publik.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Kepala Biro Fasilitasi Pelayanan Teknis menyelenggarakan fungsi:

a. Koordinasi dan fasilitasi pemeriksaan khusus, resolusi dan pemantauan laporan masyarakat.
b. Koordinasi dan fasilitasi pengendalian mutu dan pengelolaan laporan masyarakat.
c. Koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pengawasan pelayanan publik.
d. Pelaporan pengawasan pelayanan publik.
e. Pelaksanaan administrasi biro.

2. **Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Teknologi Informasi**

   Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Teknologi Informasi mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan pengembangan hubungan masyarakat dan pengelolaan teknologi informasi.

   Dalam melaksanakan tugas tersebut, Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Teknologi Informasi menyelenggarakan fungsi:

   a. Koordinasi dan pengembangan hubungan masyarakat.
   b. Pengelolaan dan pengembangan teknologi informasi.
   c. Pengelolaan data dan layanan kepustakaan.
   d. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan hubungan masyarakat dan teknologi informasi.
   e. Pelaksanaan administrasi biro.

3. **Inspektur**

   Inspektur mempunyai tugas melaksanakan pengawasan internal di lingkungan Sekretariat Jenderal Ombudsman.

   Dalam melaksanakan tugas tersebut, Inspektur menyelenggarakan fungsi :

   a. Penyusunan kebijakan teknis pengawasan internal.
   b. Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya.
   c. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu.
   d. Pelaksanaan pengawasan lainnya atas penugasan Sekretaris Jenderal.
   e. Penyusunan laporan hasil pengawasan.
   f. Pelaksanaan administrasi Inspektorat.

H. Ketentuan Lain-lain

1. Dokumen/berkas administrasi yang akan diproses adalah berkas yang lengkap sesuai dengan ketentuan yang dipersyaratkan;
2. Dalam seleksi ini tidak dikenakan biaya atau pungutan dalam bentuk apapun;
3. Seluruh biaya akomodasi, transportasi, kelengkapan administrasi, dan biaya pribadi yang dikeluarkan oleh peserta selama proses seleksi ditanggung oleh peserta;
4. Keputusan Panitia Seleksi Terbuka Jabatan Tinggi Pratama Ombudsman Republik Indonesia bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat;
5. Apabila di kemudian hari diketahui pelamar memberikan data/keterangan tidak benar, maka Panitia Seleksi Terbuka Jabatan Tinggi Pratama Ombudsman Republik Indonesia berhak membatalkan hasil seleksi.

Catatan:

Jadwal kegiatan sewaktu-waktu dapat berubah dan setiap perubahan jadwal akan diumumkan melalui website Ombudsman RI **www.ombudsman.go.id**, untuk itu para peserta seleksi agar aktif mengakses website dimaksud. Kelalaian karena tidak mengikuti perkembangan informasi seleksi menjadi tanggungjawab peserta.

Jakarta, 23 November 2018
Ketua Panitia Seleksi,

Ahmad Alamsyah Saragih, S.E.

Lampiran I Pengumuman
Nomor : PG.KP.02.01/ 03 /XI-2018
Tanggal : 23 November 2018

SURAT LAMARAN

....., ... 2018

Yth. Ketua Panitia Seleksi
Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Ombudsman RI
di Jakarta

Sehubungan dengan pengumuman Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Ombudsman RI Nomor ..... tanggal ....., saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
NIP/NRP/NIK :
Pangkat/Jabatan :
Unit Kerja :
Jabatan yang dilamar :
Alasan memilih jabatan yang dilamar :

mengajukan diri untuk mengikuti Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dan akan mengikuti seluruh ketentuan yang telah ditetapkan oleh Panitia Seleksi.

Sebagai kelengkapan pendaftaran, terlampir saya sampaikan seluruh dokumen persyaratan yang ditentukan.

Demikian saya sampaikan, atas perhatian Bapak saya ucapkan terima kasih.

Hormat saya

Materai
Rp 6.000,00

Nama
NIP/NRP/NIK .....

Lampiran II Pengumuman
Nomor : PG.KP.02.01/03 /XI-2018
Tanggal : 23 November 2018

Pas Photo 4x6
Berwarna

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

I. DATA PRIBADI

a. Nama (Lengkap dengan Gelar) :
b. NIP / No. KARPEG :
c. Tempat,Tanggal Lahir :
d. Jenis Kelamin :
e. Pangkat / Golongan :
f. TMT CPNS :
g. TMT PNS :
h. Jabatan terakhir :
i. Agama :
j. Status Perkawinan :
Jumlah anak :
k. Alamat Rumah :
l. Nomor Telepon / HP :
m. Alamat e-mail :
n. KTP :
o. NPWP

II. RIWAYAT PANGKAT

Pangkat (Gol)	TMT Pangkat	Nomor SK	Tanggal SK
dst			

III. RIWAYAT JABATAN

No	Jabatan	Uraian Singkat Tugas dan Kewenangan Jabatan	Nomor SK	Periode Menjabat	Nama Atasan Langsung	No Kontak Atasan Langsung (telepon, HP)
1						
2						
3						
dst						

IV. RIWAYAT PENDIDIKAN FORMAL

Pendidikan	Jurusan	Nama Sekolah / Universitas	Nomor Ijasah
Sekolah Dasar			
SLTP			
SLTA /SMU			
Diploma			
S1			
S2			
S3			

V. RIWAYAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

No	Nama Diklat/ Shortcourse/Workshop	Lembaga Penyelenggara	Nomor Sertifikat	Tahun
1				
2				
3				
4				
5				
dst				

VI. RIWAYAT PENUGASAN LAIN

Nama Tim / Kelompok Kerja	Instansi / Lembaga	Nomor Surat Penugasan	Tahun
dst			

VII. PRESTASI

No	Prestasi yang pernah dicapai*	Tingkat**	Pemberi Penghargaan	Tahun Perolehan
1				
2				
3				
4				
dst				

*) Tuliskan prestasi yang dicapai dengan detail.

**) Tingkat : Organisasi Kerja, Nasional, Internasional

VIII. KARYA TULIS

Buku, Makalah, Penelitian, Bahan Seminar yang pernah dipublikasikan

No	Judul	Tahun
1		
2		
3		
dst		

IX. KEGIATAN SOSIAL KEMASYARAKATAN

No	Nama Organisasi / Kegiatan	Jabatan	Tahun
1			
2			
3			
dst			

Dengan ini saya menyatakan bahwa Daftar Riwayat Hidup ini telah saya isi dengan benar dan lengkap. Apabila ternyata data yang saya isi terbukti tidak benar, saya bersedia dinyatakan gugur dalam proses seleksi.

.....,.....2018

Nama
NIP

Keterangan :

Peserta dapat menambahkan baris pada semua tabel apabila data yang perlu ditampilkan belum terakomodasi pada baris tabel yang tersedia.

Lampiran III Pengumuman
Nomor : PG.KP.02.01/ 03 /XI-2018
Tanggal : 23 November 2018

SURAT PERSETUJUAN
PEJABAT PEMBINA KEPEGAWAIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	:
NIP/NRP/NIK*	:
Pangkat (Gol.)	:
Jabatan	:
Kementerian/Lembaga/Instansi	:

selaku Pejabat Pembina Kepegawaian dari:

Nama	:
NIP/NRP/NIK*	:
Pangkat (Gol.)	:
Jabatan	:
Kementerian/Lembaga/Instansi	:

menyatakan dengan sebenarnya bahwa yang bersangkutan memenuhi syarat untuk mengikuti Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Ombudsman RI Tahun 2018 dan menyetujui yang bersangkutan untuk mengikuti kegiatan seleksi dimaksud.

.....,.....2018

Meterai
Rp 6.000,00

Nama
NIP/NRP/NIK*

**Sesuai dengan nomor identifikasi pada instansi pelamar.*

Lampiran IV Pengumuman
Nomor : PG.KP.02.01/ 03 /XI-2018
Tanggal : 23 November 2018

SURAT KETERANGAN ATASAN LANGSUNG

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
NIP/NRP/NIK* :
Jabatan :
Unit Kerja :

Selaku atasan langsung dari:

Nama :
NIP/NRP/NIK* :
Jabatan :
Unit Kerja :

menyatakan dengan sebenarnya bahwa yang bersangkutan tidak pernah dijatuhi hukuman pidana, hukuman disiplin tingkat Sedang dan tingkat Berat berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 30 Tahun 1980 maupun PP Nomor 53 Tahun 2010.

Surat keterangan ini dibuat untuk memenuhi persyaratan dalam rangka mendaftarkan diri mengikuti Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Ombudsman RI.

....., ...2018

Meterai
Rp 6.000,00

Nama
NIP/NRP/NIK

**Sesuai dengan nomor identifikasi pada instansi pelamar.*

Lampiran V Pengumuman
Nomor : PG.KP.02.01/03 /XI-2018
Tanggal : 23 November 2018

SURAT PERNYATAAN

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama :

NIP/NRP/NIK* :

Jabatan :

Unit Kerja :

menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya tidak memiliki afiliasi dan/atau menjadi anggota Partai Politik, dan tidak pernah menjadi calon anggota legislatif Partai Politik.

Surat pernyataan ini saya buat untuk memenuhi persyaratan dalam rangka mendaftarkan diri mengikuti Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Ombudsman RI, dan dibuat dalam keadaan sadar dan tidak ada paksaan dari pihak manapun.

Apabila pernyataan ini tidak benar, maka saya sanggup menanggung segala risiko sesuai ketentuan yang berlaku.

.....,.....2018

Meterai
Rp 6.000,00

Nama
NIP/NRP/NIK*

**Sesuai dengan nomor identifikasi pada instansi pelamar.*

Lampiran VI Pengumuman
Nomor : PG.KP.02.01/03 /XI-2018
Tanggal : 23 November 2018

PAKTA INTEGRITAS

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
NIP/NRP/NIK* :
Pangkat (Gol.) :
Jabatan :
Kementerian/Lembaga/Instansi :

dalam rangka mengikuti Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Ombudsman RI Tahun 2018, dengan ini menyatakan bahwa saya:

1. tidak akan melakukan praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN);
2. tidak akan melakukan komunikasi yang mengarah kepada KKN;
3. tidak akan memberikan sesuatu yang berkaitan yang dapat dikategorikan sebagai suap dan/atau gratifikasi;
4. akan melaporkan kepada pihak yang berwenang apabila mengetahui terdapat indikasi praktik KKN.

Apabila saya melanggar hal-hal yang telah saya nyatakan dalam Pakta Integritas ini, saya bersedia dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

.....,.....2018

Meterai
Rp 6.000

Nama
NIP/NRP/NIK*

**Sesuai dengan nomor identifikasi pada instansi pelamar.*